

TESIS

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN
TERHADAP HUKUMAN MATI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**



Oleh

CHRISTINE OKTAVIA

NIM. 2320215320043

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

TESIS

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN
TERHADAP HUKUMAN MATI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**



Oleh

CHRISTINE OKTAVIA

NIM. 2320215320043

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN
TERHADAP HUKUMAN MATI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

CHRISTINE OKTAVIA

NIM. 2320215320043

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**Judu Tesis : PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN
TERHADAP HUKUMAN MATI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

**Nama : Christine Oktavia
NIM : 2320215320043**

**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....

Pembimbing



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christine Oktavia

NIM : 2320215320043

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 29 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Christine Oktavia

NIM. 2320215320043

OKTAVIA, CHRISTINE. 2025. PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN TERHADAP HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 119 halaman.

RINGKASAN

Perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri merupakan isu mendesak yang menempatkan negara pada posisi tanggung jawab konstitusional dan moral. Dalam praktiknya, banyak perempuan migran Indonesia yang terjerat dalam kasus tindak pidana narkotika akibat eksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia dan lemahnya perlindungan hukum sejak tahap pra-penempatan. Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan gender, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta ketidaksiapan negara dalam melakukan intervensi cepat melalui jalur diplomatik maupun bantuan hukum substantif. Negara-negara tujuan seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Tiongkok memiliki kebijakan pidana narkotika yang keras dan cenderung tidak membedakan antara korban dan pelaku. Dalam konteks ini, perempuan migran seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan keberdayaan hukum yang rendah. Permasalahan ini menuntut adanya reformasi kebijakan nasional yang berorientasi pada hak asasi manusia dan keadilan substantif agar perlindungan terhadap kelompok rentan ini dapat diwujudkan secara nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh kebijakan nasional yang telah dan sedang diberlakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Penelitian ini juga menggali strategi kebijakan progresif berbasis keadilan substantif dan perspektif gender, yang dapat dijadikan landasan dalam membentuk sistem perlindungan terpadu. Kegunaan penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan internasional dalam hubungannya dengan perlindungan kelompok rentan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kementerian Luar Negeri, dalam merumuskan pendekatan baru yang lebih humanistik dan berbasis hak untuk mengatasi persoalan ancaman hukuman mati terhadap perempuan migran. Selain itu, hasil ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh LSM, akademisi, dan kalangan hukum dalam advokasi perlindungan pekerja migran.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan; serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan bahan

hukum dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif dan argumentatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang ada, tetapi juga memberikan saran normatif terhadap pembentukan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori perlindungan hukum, teori keadilan substantif, dan teori negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menempatkan negara sebagai pelindung utama hak asasi warga negaranya, baik di dalam maupun luar negeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati masih bersifat fragmentaris dan kurang tanggap terhadap dinamika kejahatan transnasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum secara eksplisit mengatur tentang skema pelindungan terhadap mereka yang terjerat kasus pidana berat di luar negeri, apalagi yang menjadi korban perdagangan manusia. Diplomasi hukum yang dilakukan pemerintah masih bersifat kasuistik dan seringkali terlambat dalam menangani kasus-kasus kritis. Bantuan hukum juga belum menjangkau seluruh pekerja migran yang membutuhkan, terutama mereka yang menghadapi stigma sebagai pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, strategi reformasi kebijakan diperlukan, mulai dari perbaikan tata kelola pra-penempatan hingga penguatan peran misi diplomatik. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan protokol pelindungan khusus berbasis gender bagi perempuan migran, peningkatan kapasitas diplomatik yang humanistik, serta penyusunan kebijakan responsif berbasis prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif. Dengan langkah ini, pelindungan terhadap pekerja migran perempuan dapat ditingkatkan secara nyata dan menyeluruh.

OKTAVIA, CHRISTINE. 2025. PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN TERHADAP HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 119 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Pekerja Migran Perempuan, Hukuman Mati, Tindak Pidana Narkotika

Penelitian ini berjudul Perlindungan Pekerja Migran Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika, yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum nasional serta peran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran perempuan Indonesia yang terancam hukuman mati akibat keterlibatan, baik secara sadar maupun sebagai korban eksploitasi, dalam kasus tindak pidana narkotika di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder untuk menggali solusi kebijakan yang lebih progresif dan responsif.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Konvensi Internasional, dan praktik diplomasi hukum, ditemukan bahwa kebijakan perlindungan saat ini masih bersifat fragmentaris, belum responsif gender, dan belum membentuk skema penanganan sistemik terhadap kasus pidana berat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang menempatkan perempuan migran sebagai subjek hukum yang berhak atas keadilan substantif dan perlakuan setara di hadapan hukum.

Mekanisme yang ada belum mampu memberikan kepastian dan jaminan perlindungan maksimal karena masih terkendala oleh birokrasi, kurangnya respons cepat, dan tidak adanya standar protokol khusus untuk pekerja migran yang menghadapi ancaman pidana mati. Rekomendasi diberikan untuk membentuk unit bantuan hukum terpadu di perwakilan luar negeri dan mengintegrasikan kebijakan perlindungan berbasis gender dalam strategi diplomasi nasional.

OKTAVIA, CHRISTINE. 2025. PROTECTION OF FEMALE MIGRANT WORKERS AGAINST THE DEATH PENALTY IN NARCOTICS CRIMES. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 119 pages.

ABSTRACT

Keywords: Protection of Female Migrant Workers, Death Penalty, Narcotics Crime

This research is entitled Protection of Female Migrant Workers against the Death Penalty in Narcotics Crimes, aiming to analyze national legal policies and the role of the state in providing protection for Indonesian female migrant workers who are facing the death penalty due to their involvement—either voluntarily or as victims of exploitation—in narcotics-related criminal cases abroad. The study adopts a normative juridical method using statutory, conceptual, and case-based approaches, examining both primary and secondary legal materials to explore more progressive and responsive policy solutions.

Based on an analysis of Law Number 18 of 2017, international conventions, and current practices in legal diplomacy, the research finds that the existing protection framework remains fragmented, lacks gender responsiveness, and has not established a systemic mechanism for handling serious criminal cases. Therefore, policy reform is urgently needed to position female migrant workers as legal subjects entitled to substantive justice and equal treatment under the law.

The current mechanisms have not yet ensured certainty and maximum protection due to bureaucratic constraints, the absence of prompt responses, and the lack of a standardized protocol specifically designed for migrant workers facing capital punishment. This study recommends the establishment of integrated legal aid units within overseas diplomatic missions and the integration of gender-sensitive protection policies into the national diplomatic strategy.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menyertai setiap proses kehidupan penulis, terlebih dalam penyusunan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Pekerja Migran Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika”. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan, kasih dan pertolongan Tuhan telah nyata sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bagian dari syarat memperoleh gelar Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Tesis ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi pekerja migran perempuan Indonesia, khususnya ketika berhadapan dengan sistem hukum pidana di negara tujuan, yang dalam beberapa kasus menjatuhkan vonis hukuman mati atas keterlibatan mereka dalam tindak pidana narkotika. Penulis menyadari bahwa menyelami dan mengkaji permasalahan ini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata, melainkan harus disertai dengan kepekaan terhadap aspek kemanusiaan, keadilan gender, serta sistem perlindungan negara terhadap warga negaranya di luar negeri.

Oleh karena itu, tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam proses penyusunannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang selama ini telah memberikan dukungan akademik dan administratif dalam proses pendidikan dan penelitian. Lingkungan akademik yang dinamis dan kondusif di fakultas ini menjadi ruang berkembangnya pemikiran hukum kritis dan progresif.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif

yang sangat membantu kelancaran proses studi penulis selama menjalani pendidikan magister.

3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Ketua, yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis dalam menyusun tesis ini, memberikan arahan, masukan kritis, dan motivasi yang membangun dari tahap awal hingga tahap akhir penulisan.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membagikan wawasan hukum, semangat intelektual, dan semangat pelayanan sebagai akademisi, yang semuanya telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan penulis sebagai mahasiswa dan calon praktisi hukum.
5. Rekan-rekan seangkatan dan komunitas akademik, yang telah menjadi sahabat diskusi, tempat saling menguatkan, dan berbagi semangat dalam menghadapi tantangan akademik bersama.
6. Para pegawai dan staf administrasi, yang dengan ramah dan sigap membantu setiap kebutuhan penulis, mulai dari proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun penulis berharap, karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati.

Banjarmasin, Juni 2025
Penulis,

Christine Oktavia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN..	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	33
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	39
BAB II KEBIJAKAN UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN TERHADAP ANCAMAN HUKUMAN MATI	40
A. Urgensi Perlindungan terhadap Pekerja Migran Perempuan dalam Konteks Ancaman Hukuman Mati.....	40
B. Evaluasi Kebijakan Nasional dalam Perlindungan Pekerja Migran Perempuan terhadap Hukuman Mati.....	52
C. Formulasi Kebijakan Progresif untuk Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran Perempuan terhadap Hukuman Mati.....	67

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA YANG TERANCAM HUKUMAN MATI DI LUAR NEGERI.....	79
A. Dimensi Hukum dan Hak Asasi dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Perempuan.....	79
B. Mekanisme Diplomasi dan Bantuan Hukum terhadap Pekerja Migran Perempuan.....	93
C. Strategi Reformasi Perlindungan Berbasis Gender dan Keadilan Substantif.....	106
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

